Copyright © 2025 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 3 Agustus 2025

# Efektivitas Redistribusi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke Sekolah Swasta

**Ali Wahyudi[1], Sudadi[2], Mugirah[3], Nurkolis[4]**
[1,2,3,4]Universitas PGRI Semarang, Indonesia

[1]wahyudi695@gmail.com

**Abstrak**

Kebijakan redistribusi guru ASN PPPK di sekolah swasta berdasarkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan redistribusi guru berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah swasta. Penelitian ini merupakan kajian *narrative review* karena memungkinkan penulis untuk mengkaji secara deskriptif dari sumber kepustakaan yang relevan seperti artikel jurnal, laporan kebijakan atau artikel media edukatif. Hasil penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa kajian penelitian sebelumnya merupakan penelitian kualitatif. Setelah melakukan telaah tematik diperoleh bahwa kebijakan redistribusi guru ASN PPPK memiliki dampak positif dan negatif terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta. Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, adaptasi guru, keberlanjutan kontrak, serta kesiapan sekolah swasta menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan ini.

**Kata kunci**: redistribusi guru ASN PPPK, sekolah swasta, kualitas pendidikan

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru sebagai tenaga pendidik memegang peran krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah pemerataan distribusi guru. Permasalahan ini ditemui di beberapa wilayah, ada sekolah negeri yang kelebihan guru, di sisi lain terdapat banyak sekolah swasta yang mengalami kekurangan guru. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah swasta dalam Upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia (Arifa, 2025; Juhri et al., 2024; Kemendikdasmen, 2025).

Ketidakseimbangan jumlah guru di sekolah negeri yang berlebih dan kurangnya guru di sekolah swasta disebabkan oleh perpindahan guru akibat program PPPK. Oleh karena itu, kebijakan Permendikdasmen bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengembangkan kompetensi di berbagai lingkungan pendidikan serta mendukung sekolah swasta yang sering kali beroperasi dengan keterbatasan sumber daya. Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta diharapkan memberikan dampak positif antara lain pemerataan pendidikan berkualitas terutama di wilayah 3T, pengembangan profesional guru ASN, peningkatan kompetensi guru swasta serta penguatan kerjasama satuan pendidikan yang diselenggarakan

pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Arifa, 2025; Dhamayanti & Santosa, 2024; Husaini, 2020; Setianingrum, 2020).

Meskipun memiliki berbagai dampak positif, namun implementasi kebijakan ini memiliki beberapa tantangan antara lain resistensi dari guru ASN, penyesuaian guru ASN dengan lingkungan baru, dan koordinasi antara pemerintah dan sekolah swasta. Tidak semua guru ASN bersedia ditempatkan di sekolah swasta, terutama jika lokasinya terpencil. Guru ASN juga perlu beradaptasi dengan budaya dan sistem kerja di sekolah swasta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di sekolah menengah pertama negeri menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi selama proses redistribusi adalah rasio guru-siswa yang tinggi, sekolah berhasil mengatasi situasi ini melalui inovasi dalam pengajaran, upaya kolaboratif antara guru, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Rasio guru-siswa yang tinggi menyebabkan distribusi beban kerja tidak merata sehingga menurunkan kualitas pengajaran dan meningkatkan risiko kelelahan di kalangan guru. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa manajemen dan distribusi guru di sekolah tersebut berlangsung dengan baik dan efisien. Sistem redistribusi guru yang terorganisir dengan cermat, didukung oleh sistem dapodik, mampu menjaga keseimbangan dan kelangsungan distribusi pendidik sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran (Arifudin et al., 2024; Pradana & Mayasari, 2024; Rayhan & Maulana, 2024).

Penelitian yang dilakukan pada lingkup sekolah dasar negeri menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan guru secara merata masih belum berjalan dengan baik karena banyaknya guru Pegawai Negeri Sipil yang pensiun tidak diimbangi dengan rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil yang memadai, adanya keterbatasan anggaran dan terbatasnya kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan tata kelola guru ini adalah tingkat perubahan yang diharapkan dan letak pengambilan keputusan yang terkait dengan faktor konten kebijakan, sedangkan terkait faktor konteks implementasi kebijakan, yang paling berpengaruh adalah strategi aktor yang terlibat (Lestari & Nugroho, 2021).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak membahas tentang proses redistribusi guru ASN di sekolah negeri dan ASN PNS sehingga kajian yang berfokus pada guru ASN PPPK sekolah swasta masih terbatas. Selain itu kajian sebelumnya membahas tantang implikasi administratif dan presepsi atas kebijakan redistribusi ASN PPPK yang masih dilakukan secara sporadis sehingga perlu dilakukan sintesis antar hasil penelitian di beberapa wilayah. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait kebijakan redistribusi guru ASN PPPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas redistribusi guru ASN PPPK ke sekolah swasta, dengan fokus pada dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan di sekolah swasta, kesiapan sekolah dalam menghadapi perubahan tenaga pendidik, serta strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi tantangan. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana pengelola sekolah swasta menyikapi kebijakan ini, serta strategi yang mereka gunakan untuk memastikan bahwa kehadiran guru ASN PPPK dapat meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan swasta.

## Metode

Penelitian ini merupakan narrative literatur review untuk mengkaji secara mendalam efektivitas redistribusi guru ASN PPPK di sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengkaji secara deskriptif dan analitis dari sumber kepustakaan yang relevan seperti artikel jurnal, laporan kebijakan atau artikel media edukatif. Strategi penelusuran yang dipilih sebagai sumber data

Copyright © 2025 The Author(s)

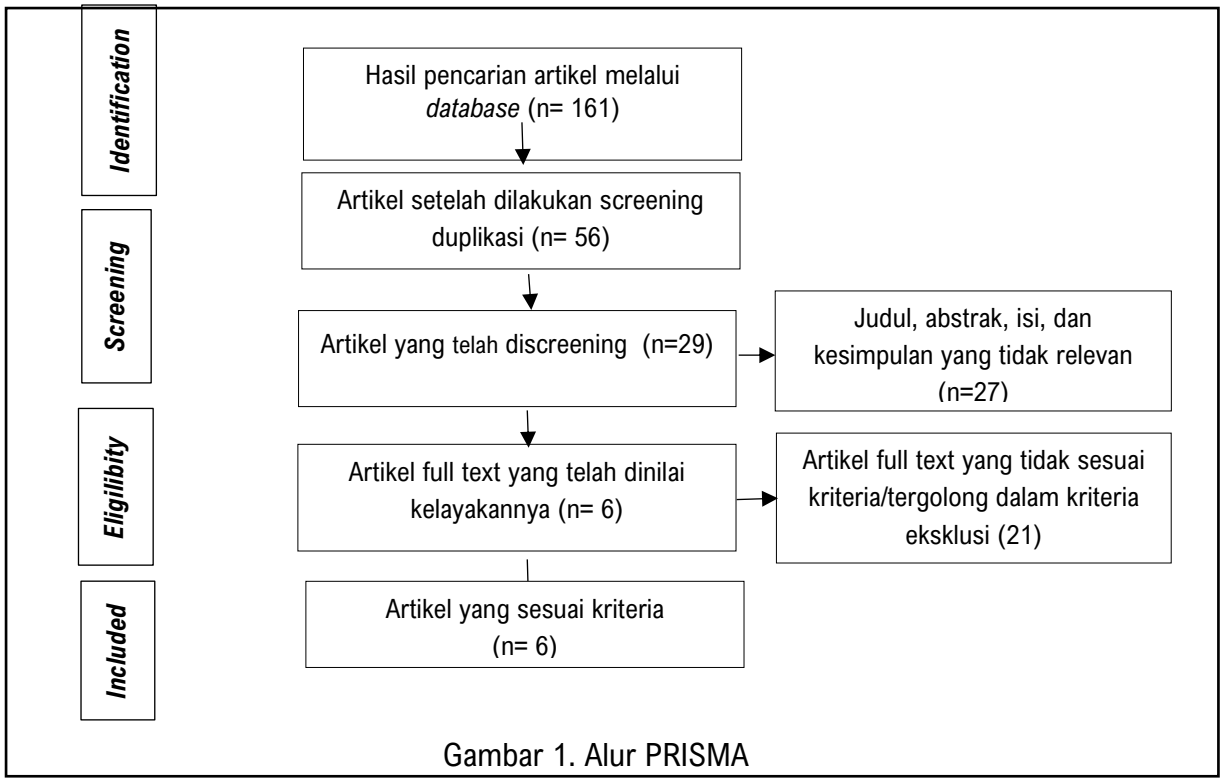

dicari dengan kata kunci menggunakan bahasa indonesia atau bahasa inggris yaitu redistribusi guru ASN PPPK OR kebijakan guru ASN PPPK OR pemerataan guru OR kebijakan guru sekolah swasta OR kualitas pendidikan.

Adapun kriteria kelayakan yang dijadikan sebagai acuan penulis yakni dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada tinjauan ini adalah artikel yang terbit di jurnal bereputasi nasional atau internasional, artikel *full text,* artikel berbahasa Inggris atau Indonesia, artikel penelitian (*research article*) yang terbit dalam 5 tahun terakhir, artikel penelitian yang dilakukan pada jenjang sekolah swasta di Indonesia, dan artikel yang direview adalah artikel kualitatif atau kuantitatif atau *mixed method*. Artikel yang membahasan terkait redistribusi guru di sekolah negeri dikecualikan dalam penelitian.

# Hasil

### *Hasil Penelusuran Artikel Penelitian*

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan secara mendalam, penulis memperoleh artikel ilmiah terkait kebijakan guru ASN PPPK di sekolah swasta. Dari seluruh artikel ilmiah yang diperoleh, seluruhnya merupakan artikel kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Artikel yang memenuhi kriteria diterbitkan antara tahun 2021-2024 dengan rincian 50% artikel tahun 2024, 16,67% diterbitkan masing-masing tahun 2021, 2022 dan 2023. Berikut merupakan alur PRISMA penelusuran artikel disajikan pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Alur PRISMA

Ditinjau dari cakupan lokasi penelitian, empat dari enam artikel yang ditinjau tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi penelitian tertentu, sehingga kecenderungannya bersifat umum atau nasional. Sementara itu dua artikel jelas menyebutkan lokasi penelitian. Sehingga dalam hal ini menjadi keterbatasan kajian ini karena belum terlihat perbedaan dampak antar daerah atau antara sekolah di berbagai konteks lokal. Dengan demikian diperlukan penelitian komparatif

antarwilayah dan studi yang lebih rinci dengan metode penelitian berbeda. Berikut merupakan tabel analisis trend penelusuran artikel penelitian.

Tabel 1 Analisis Trend Publikasi Penelitian

| Tahun Publikasi | Peneliti | Metode Penelitian | Judul |
|---|---|---|---|
| 2021 | Elga Andina (Andina & Arifa, 2021) | Kualitatif | Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia *(Problematic of Selection and Recruitment of Government Teachers in Indonesia)* |
| 2022 | Nuraini Karim Damanik (Damanik et al., 2022) | Kualitatif | Kebijakan Penerimaan PPPK Guru dan Dampak terhadap Pendidikan Swasta |
| 2023 | Sherin Dwi Utami (Utami et al., 2023) | Kualitatif | Tersejahteranya Guru Honorer dengan Adanya Kebijakan PPPK |
| 2024 | Irnie Victorunie (Victorynie et al., 2024) | Kualitatif (Studi kasus) | Dampak Kebijakan Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhadap Lembaga Pendidikan Swasta |
| 2024 | Angga Agustian (Agustian et al., 2024) | Kualitatif (studi kasus) | Organizational capacity ff educational office In the field of teachers and educational personnel of West Java Province in the placement of *PPPK* teachers |
| 2024 | Tere Aderampas (Aderempas & Ramadhan, 2024) | Kualitatif (studi kasus) | Pengaruh Minat Guru Sekolah Swasta Terhadap Program PPPK (Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja) dan Implikasinya terhadap Lembaga Pendidikan Tempat Mereka Bekerja (Studi Kasus Smpit Cahaya Robbani Kepahiang) |

Dari aspek waktu publikasi, perkembangan fokus riset memperlihatkan pergeseran yang signifikan. Pada tahun 2021, penelitian lebih menyoroti aspek desain kebijakan, khususnya perbaikan sistem seleksi dan rekrutmen berbasis kebutuhan serta kompetensi guru. Tahun 2022, kajian mulai menyinggung dampak awal, termasuk pro-kontra penghentian rekrutmen PNS dan kerugian yang dialami sekolah akibat perpindahan guru. Tahun 2023 menunjukkan pendalaman pada sisi dampak, di mana kesejahteraan guru honorer meningkat namun diimbangi dengan munculnya kekurangan guru di sekolah swasta. Pada 2024 fokus penelitian beralih pada aspek implementasi, meliputi kapasitas organisasi GTK, keterbatasan pemanfaatan teknologi untuk pemetaan, serta kekhawatiran bergesernya minat guru dari sekolah swasta ke PPPK. Pola ini mengilustrasikan perjalanan penelitian dari ranah desain kebijakan, menuju evaluasi dampak awal, hingga menyoroti tantangan implementasi.

Berdasarkan sintesis hasil penelitian diperoleh bahwa pada program redistribusi guru ASN PPPK ke sekolah swasta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan guru terutama yang berusia di atas 35 tahun. Melalui kebijakan ini, guru honorer senior yang sebelumnya terkendala batasan usia kini mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi ASN PPPK tanpa diskriminasi umur, bahkan bagi mereka yang telah berusia lebih dari 35 tahun (Victorynie et al., 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan status dan kesejahteraan ekonomi guru, tetapi juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Sejalan dengan itu, PPPK juga dipandang sebagai kebijakan yang mampu mensejahterakan guru honorer di Indonesia secara lebih luas (Utami et al., 2023). Dampak positif lainnya adalah adanya

Copyright © 2025 The Author(s)


pengakuan atas dedikasi dan pengabdian panjang guru honorer, yang kini mendapatkan penghargaan melalui status dan kesejahteraan yang lebih baik (Aderempas & Ramadhan, 2024). Dengan demikian, program redistribusi ASN PPPK dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperkuat mutu pendidikan di sekolah swasta.

Hasil temuan artikel juga menyimpulkan bahwa selain memberikan dampak positif, program redistribusi guru ASN PPPK juga menimbulkan dampak negatif bagi sekolah swasta. Perpindahan guru honorer yang diterima sebagai ASN PPPK sering kali menyebabkan kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran di lembaga tersebut. Selain itu, kebijakan PPPK memicu pro dan kontra, terutama karena penghentian rekrutmen ASN serta adanya guru yang harus dipindahkan ke sekolah lain, sehingga sekolah asal kehilangan tenaga pendidiknya dan mengalami kerugian dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Lebih jauh, muncul pula kekhawatiran bahwa minat guru untuk mengabdi di sekolah swasta semakin berkurang, sebab perbedaan gaji, status, dan beban jam kerja antara guru swasta dan ASN PPPK cukup signifikan, yang pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta (Aderempas & Ramadhan, 2024; Damanik et al., 2022; Utami et al., 2023).

Kebijakan redistribusi guru ASN PPPK ke sekolah swasta memiliki beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil temuan Agustian (2024) dan Andina (2021) menemukan bahwa kapasitas organisasi GTK belum optimal, keterbatasan pegawai, minimnya pelatihan manajemen penempatan PPPK, dan terbatasnya pemanfaatan teknologi untuk pemetaan guru menjadi faktor penghambat kebijakan ini. Selain itu sistem seleksi dan rekrutmen belum berbasis kebutuhan nyata di lapangan, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi. Oleh karena itu, sistem seleksi penerimaan guru ASN PPPK dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pemetaan guru menjadi sangat penting untuk menempatkan guru secara tepat sesuai kebutuhan sekolah, disertai peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan manajemen penempatan PPPK (Agustian et al., 2024; Andina & Arifa, 2021).

# Pembahasan

### *Kebijakan Redistribusi Guru ASN PPPK*

Redistribusi guru adalah kebijakan untuk memindahkan guru dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan. Redistribusi guru dapat dilakukan antar kabupaten/kota, antar provinsi, atau antar satuan pendidikan negeri dan swasta. Kemendikdasmen (2025) mendifinisikan redistribusi sebagai penunjukan Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Guru ASN yang dimaksud adalah guru PNS dan Guru PPPK. Redistribusi ini dengan mempertimbangkan data kebutuhan guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang diperoleh dari data pokok pendidikan Kementerian (Kemendikdasmen, 2025).

Kebijakan redistribusi ini memiliki beberapa ketentuan utama antara lain penentuan kebutuhan guru yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta; kriteria guru harus memenuhi persyaratan yang diharapkan; kerjasama dengan sekolah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat; redistribusi guru ASN diprioritaskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana kekurangan guru berkualitas lebih terasa; durasi distribusi; mekanisme redistribusi dilakukan secara transparan melalui sistem informasi yang dikelola oleh

Kemendikdasmen dan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan redistribusi ini untuk memastikan efektivitas kebijakan (Arifa, 2025; Sholihah & Muhibbin, 2023).

Berdasarkan Permendikdasmen nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa guru ASN PPPK yang bisa diredistribusi harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama; memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik; sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana (Kemendikdasmen, 2025).

***Dampak Kebijakan Redistribusi Guru ASN PPPK di Sekolah Swasta***

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui bahwa kebijakan redistribusi guru ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Redistribusi guru ASN akan memperluas tenaga pengajar yang berkualitas di daerah yang selama ini kekurangan guru berkualitas, menjadikan langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kini ada kesempatan bagi sekolah swasta di seluruh negara, baik di perkotaan maupun terpencil, untuk mempekerjakan pendidik yang telah terlatih dan memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola kelas dengan baik. Sekolah swasta memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan standar pendidikan mereka sebagai akibat dari keputusan ini (Gunawan et al., 2024; Qomariyah & Duryat, 2024).

Selain itu adanya kebijakan redistribusi guru ASN PPPK ini dapat meningkatkan pemerataan pendidikan berkualitas melalui pemerataan kualitas guru tersertifikasi. Sekolah swasta selama ini banyak mengandalkan guru non-ASN, dan kebijakan redistribusi ini akan membawa dampak positif dalam hal kualitas pengajaran yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan. Hal ini akan memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa di sekolah swasta untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Dengan adanya redistribusi, secara tidak langsung akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah swasta dalam meningkatkan kinerjanya (Aderempas & Ramadhan, 2024; Ismail et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2024) menemukan bahwa kebijakan redistribusi guru ASN bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan polemik, terutama bagi sekolah swasta yang kehilangan tenaga pendidik berpengalaman akibat perpindahan ke sekolah negeri (Damanik et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Victorynie (2024) menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi guru ASN justru menimbulkan dampak negatif terhadap sekolah swasta, seperti menurunnya kualitas pendidikan akibat kehilangan guru-guru berkompetensi tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Damanik et al. (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan ini tidak selalu memberikan solusi yang optimal bagi pendidikan di sekolah swasta (Victorynie et al., 2024).

***Tantangan dan Strategi Redistribusi Guru ASN PPPK di Sekolah Swasta***

Redistribusi guru ASN PPPK ke sekolah swasta menimbulkan ketegangan administratif dan kemungkinan perbedaan pendapat/konflik antara kepala sekolah swasta dan guru ASN PPPK yang masuk. Tantangan ini termasuk perbedaan sistem manajemen, status kepegawaian, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan yayasan (Hainor Rahman, 2025). Sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan seringkali mengalami tantangan dalam menghadapi kebijakan redistribusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa redistribusi anggaran ke sekolah negeri dapat mengurangi daya saing sekolah swasta dalam menarik peserta didik. Hal ini

Copyright © 2025 The Author(s)


disebabkan oleh meningkatnya kualitas fasilitas dan tenaga pendidik di sekolah negeri akibat intervensi kebijakan, sehingga masyarakat lebih memilih institusi pendidikan yang memperoleh subsidi lebih besar dari pemerintah. Dampak lainnya adalah penyesuaian biaya operasional di sekolah swasta yang kerap mengalami tekanan finansial akibat berkurangnya jumlah pendaftar. Akibatnya, beberapa sekolah swasta berupaya mencari alternatif pendanaan melalui kemitraan atau peningkatan biaya pendidikan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aksesibilitas pendidikan bagi kelompok menengah ke bawah (Andina & Arifa, 2021; Irawan et al., 2024).

Kebijakan redistribusi juga memiliki konsekuensi terhadap regulasi yang mengatur operasional sekolah swasta. Beberapa kebijakan dapat membatasi peran sekolah swasta melalui peningkatan standar operasional yang mengarah pada beban administrasi yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, regulasi ini bertujuan untuk menyetarakan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, tetapi di sisi lain, sekolah swasta harus menyesuaikan diri dengan standar yang mungkin sulit dipenuhi tanpa dukungan finansial dari pemerintah. Dalam dinamika persaingan, sekolah swasta dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah meningkatnya kualitas sekolah negeri. Oleh karena itu, strategi adaptasi seperti diversifikasi kurikulum, peningkatan mutu pengajaran, dan inovasi dalam metode pembelajaran menjadi langkah penting bagi sekolah swasta dalam menghadapi dampak kebijakan redistribusi. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, kebijakan redistribusi yang tidak seimbang dapat memperbesar kesenjangan dalam akses pendidikan (Kemendikbud, 2019).

Tantangan kebijakan baru pemerintah terkait redistribusi guru ASN PPPK di sekolah swasta dapat diatasi dengan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan. Pertama, sekolah swasta dapat menawarkan insentif non-finansial seperti pelatihan profesional, jenjang karier yang lebih fleksibel, serta lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan retensi tenaga pengajar. Kedua, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi guna mendapatkan akses ke tenaga pengajar baru yang potensial. Ketiga, menerapkan kebijakan kompensasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan kesejahteraan guru, seperti program kesejahteraan tambahan atau tunjangan berbasis kinerja. Keempat, menciptakan sistem pembelajaran yang inovatif dengan teknologi pendidikan agar guru dapat lebih produktif dan termotivasi dalam mengajar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sekolah swasta dapat lebih mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan redistribusi guru dan tetap mempertahankan kualitas pendidikan yang optimal (Irawan et al., 2024).

Selain itu sekolah swasta yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan berisiko mengalami penurunan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada mobilitas sosial peserta didik. Selain itu, sekolah swasta yang berorientasi pada layanan pendidikan berbasis agama atau nilai-nilai tertentu juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kurikulumnya, terutama ketika kebijakan redistribusi lebih condong pada standarisasi pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman model pendidikan serta keberlanjutan sekolah swasta perlu dikaji lebih lanjut guna menciptakan keseimbangan antara pemerataan akses dan keberagaman pilihan pendidikan bagi masyarakat. Sekolah swasta juga dapat berupaya melakukan kolaborasi terkait kebijakan antara sekolah, pemerintah, dan organisasi pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan (Dhamayanti & Santosa, 2024). Melalui pemahaman mendalam terhadap kebijakan ini, sekolah swasta dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif, membangun keberlanjutan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu karena kebijakan yang dikaji masih baru, maka pencarian referensi yang dilakukan masih terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji efektivitas program redistribusi guru ASN PPPK yang dapat dibuktikan secara empiris melalui uji statistik.

## Kesimpulan

Hasil penelusuran artikel menemukan terdapat 6 jurnal yang memenuhi kriteria, diterbitkan antara 2021 hingga 2024 dan 50% menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun sintesis hasil menemukan bahwa kebijakan redistribusi guru ASN PPPK ke sekolah swasta bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Dampak positif yang meliputi peningkatan kualitas pengajaran di sekolah swasta, terutama di daerah 3T, dan penguatan profesionalisme guru melalui pengalaman lintas institusi. Namun, dampak negatif muncul berupa kekurangan guru di sekolah swasta akibat perpindahan guru honorer, yang dapat menurunkan kualitas pendidikan di sektor tersebut. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini antara lain penempatan guru yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sekolah, resistensi dari guru ASN terhadap penempatan di sekolah swasta, dan koordinasi yang kompleks antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak sekolah. Strategi yang dapat diupayakan adalah peningkatan kapasitas organisasi GTK, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pemetaan guru, serta pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di sekolah swasta atau daerah terpencil. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan redistribusi untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Kajian ini memiliki keterbatasan antara lain cakupan wilayah dalam artikel tidak bisa secara rinci dipaparkan sehingga belum terlihat perbedaan dampak antar daerah atau antara sekolah di berbagai konteks lokal. Dengan demikian diperlukan penelitian komparatif antarwilayah dan studi yang lebih rinci dengan metode penelitian kuantitatif atau *mix-methods*.

## References

Aderempas, T., & Ramadhan, T. A. (2024). Pengaruh Minat Guru Sekolah Swasta Terhadap Program P3k (Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja) Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan Tempat Mereka Bekerja (Studi Kasus Smpit Cahaya Robbani Kepahiang). *JMPA (Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam)*, *6*(3), 301–317.

Agustian, A., Myrna, R., & Karlina, N. (2024). Organizational Capacity Of Educational Office In The Field Of Teachers And Educational Personnel Of West Java Province In The Placement of PPPK Teachers. *DIJEMSS: Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, *6*(2), 914–927.

Andina, E., & Arifa, N. (2021). Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia Problematic of Selection and Recruitment of Government Teachers in Indonesia Pendahuluan Data Direktorat Jenderal Guru dan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *12*(1), 85–105. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2101

Arifa, F. N. (2025). *Redistribusi Guru ASN di Sekolah Swasta*.

Arifudin, Untari, S., & Burhan, A. P. I. (2024). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, *6*(2), 216–222.

Damanik, N. K., Ariyanto, A., & Setiawan, F. (2022). Kebijakan Penerimaan PPPK Guru dan Dampak terhadap Pendidikan Swasta. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, *2*(14), 354–360.

Dhamayanti, M. Z., & Santosa, A. B. (2024). Dekonstruksi Dilema Guru: Perpindahan Guru Akibat Program PPPK dan Dampaknya di Sekolah Swasta. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, *6*(2), 147–158.

Gunawan, M. R., Hadiati, E., & Ayu, S. M. (2024). Pengembangan Sumber Daya Pendidik di MA Bustanul Ulum Jayasakti Lampung Tengah. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, *4*(4), 903–912.

Copyright © 2025 The Author(s)


Hainor Rahman. (2025). *Redistribusi Guru ASN di Sekolah Swasta Wujudkan Kualitas Pendidikan*. TIMES Indonesia. https://malang.times.co.id/news/kopi-times-opini/CtDdBGMpT/Redistribusi-Guru-ASN-di-Sekolah-Swasta-Wujudkan-Kualitas-Pendidikan

Husaini, M. (2020). Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Pengembangan Silabus Dan Rpp Daring Melalui Pola Pembinaan Profesional Dengan Pendekatan Kooperatif Di Sd Negeri 1 Kumai Hulu Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. *Anterior Jurnal*, *December*.

Irawan, Idayati, F., Praskadinata, H. Y. C., Dina, F., Abdurohim, Tasriastuti, N. A., Triono, F., Irdhayanti, E., Bisri, T. S., Nurdiah, S., Harapan, E., Koesmono, T., Rachmawati, I. A. K., & Saputra, M. A. (2024). *Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan (Strategi untuk Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi dalam Organisasi)* (A. S. Egim (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.

Ismail, Akabar, M., & Widodo, S. E. (2020). Evaluation of Structuring and Equalization Policy Implementation of Civil Servant Teachers Public Senior High Schools ( SMA ) and Vocational Schools ( SMK )) in Banda Aceh the Province of Aceh. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *6*(4). https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2018.2294102

Juhri, D. A., Syafitri, I. D., Putri, F. N., Shinta, R. A., & Ermila, E. R. (2024). Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Membentuk Generasi Emas 2045. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, *8*(11), 124–130.

Kemendikbud. (2019). *Tantangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di era disrupsi* (1st ed., Issue November). Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikdasmen. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* (pp. 1–8). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Lestari, L. W. D., & Nugroho, B. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Guru PNS Tingkat Sekolah Dasar dalam Rangka Penyediaan Guru Secara Merata di Kabupaten Malang. *Jurnal Bina Patria*, *15*(10), 5705–5716.

Pradana, B. G. V., & Mayasari, A. (2024). Managemen Beban Kerja: Strategi Efektif untuk Peningkatan Kualitas. *Communnity Development Journal*, *5*(4), 7560–7565.

Qomariyah, E., & Duryat, M. (2024). Analisis Kebijakan Guru, Kebijakan P3K dan Guru Penggerak. *International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)*, *8*(1), 1–11.

Rayhan, A., & Maulana, A. (2024). Proses Redistribusi Kebutuhan Guru Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMPN 16 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *4*(1), 142–153.

Setianingrum, R. (2020). Evaluation of civil servant teacher's restructuring and equalizing policy at vocational high school. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *24*(1). https://doi.org/10.21831/pep.v24i1.24318

Sholihah, I. M., & Muhibbin, A. (2023). Evaluasi Rekruitmen ASN PPPK Jalur Formasi Guru. *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, *4*(2), 223–234.

Utami, S. D., Utami, L. W., Setiawan, F., & Lestari, S. W. (2023). Tersejahteranya Guru Honorer dengan Adanya Kebijakan P3K. *Jurnal Pendidikan Dan Soisal Budaya*, *3*(4), 684–692.

Victorynie, I., Mursiyah, U., & Zachroh, S. A. (2024). Dampak Kebijakan Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhadap Lembaga Pendidikan Swasta. *Attractive : Innovative Education Journal*, *6*(2), 200–207.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---